

**NEGOSIASI KEKUASAAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU
DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH
METODE PENELITIAN: *KUALITATIF* (STUDI KASUS)**

(SKRIPSI)

Oleh
DHEA ESTER AULIA VIDI
2456041047



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

BY

DHEA ESTER AULIA VIDY

This research aims to explore the dynamics of power relations in the implementation of the One Data Indonesia policy within regional governments. The policy, which seeks to unify data governance across governmental institutions, often encounters challenges related to authority, coordination, and institutional interests. Through a qualitative research approach, this study investigates how negotiation, communication, and inter-agency collaboration shape the success or failure of policy execution at the local level.

Data were collected through in-depth interviews with government officials, policy implementers, and data management stakeholders, supported by document analysis of related regulations and reports. The findings reveal that the effectiveness of One Data Indonesia implementation is highly influenced by informal power negotiations, bureaucratic hierarchy, and varying levels of digital readiness among regional agencies. Furthermore, leadership style and institutional trust play a crucial role in mitigating conflicts and promoting collaboration.

This study contributes to a deeper understanding of governance transformation and offers practical insights for policymakers to strengthen coordination mechanisms and ensure transparency in the era of digital bureaucracy.

**NEGOSIASI KEKUASAAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU
DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH
METODE PENELITIAN: *KUALITATIF* (STUDI KASUS)**

Oleh

DHEA ESTER AULIA VIDI

2456041047

(SKRIPSI)

Sebagai salah satu syarat untuk penilaian ujian tengah semester



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

MOTTO

“I was not born to follow the path made by others.
I was born to create my own. Even if I fall, I’ll fall forward, because every failure still
moves me closer to my dream.”

(Aku tidak dilahirkan untuk mengikuti jalan yang dibuat orang lain.
Aku dilahirkan untuk menciptakan jalanku sendiri. Bahkan jika aku jatuh, aku akan
jatuh ke depan, karena setiap kegagalan tetap membawaku lebih dekat pada impian.)

Dhea Ester Aulia Vidi

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas terselesainya tugas Ujian Tengah Semester dengan judul:

“Negosiasi Kekuasaan dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah.”

Tugas Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu penilaian pada mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas (isi nama universitasmu).

Dalam proses penyusunan tugas ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan baru mengenai dinamika koordinasi dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan Satu Data Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah atas bimbingan dan arahnya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya tulis di masa mendatang.

Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan tentang pelaksanaan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2025

Tertanda,

Dhea Ester Aulia Vidi

NPM 2456041047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
COVER DALAM.....	iii
MOTTO.....	iv
SANWACANA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	1
C. TUJUAN PENELITIAN.....	2
D. MANFAAT PENELITIAN.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A 1.KEBIJAKAN PUBLIK.....	3
2. KEKUASAAN DAN NEGOSIASI DALAM PEMERINTAHAN.....	3
3. KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA.....	4
4. KERANGKA PEMIKIRAN.....	4
III. METODE PENELITIAN	
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....	5
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	5
C. INFORMAN PENELITIAN.....	5
D. FOKUS PENELITIAN.....	6
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	6
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	7
G. KEABSAHAN DATA.....	7

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....8
B. PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA.....8
C. BENTUK NEGOSIASI KEKUASAAN ANTAR INSTANSI.....10
D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT.....10

V.PENUTUP

A. KESIMPULAN11
B. SARAN11

DAFTAR PUSTAKA.....12

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis dalam menciptakan tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala koordinasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan kepentingan antar lembaga. Fenomena ini menimbulkan dinamika negosiasi kekuasaan di antara aktor birokrasi yang terlibat.

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana proses negosiasi kekuasaan terjadi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, serta bagaimana faktor kepemimpinan, kepercayaan antar instansi, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk negosiasi kekuasaan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di pemerintah daerah?

Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika negosiasi kekuasaan antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik dan dinamika kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas tata kelola data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks Satu Data Indonesia, kebijakan ini merupakan wujud dari keputusan strategis pemerintah untuk mengintegrasikan data lintas instansi demi mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Proses implementasi kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan komunikasi antar lembaga. George C. Edwards III menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda.

2. Kekuasaan dan Negosiasi dalam Pemerintahan

Konsep kekuasaan menurut Max Weber (1947) adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya meskipun mendapat perlawanan. Dalam birokrasi pemerintahan, kekuasaan sering kali tercermin dalam bentuk kewenangan, kontrol terhadap sumber daya, dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Michel Foucault (1980) menambahkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Artinya, kekuasaan dapat digunakan untuk membangun kolaborasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Dalam konteks Satu Data Indonesia, negosiasi kekuasaan muncul ketika instansi pemerintah berupaya menyeimbangkan peran dan kepentingan mereka dalam berbagi data.

3. Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini melibatkan tiga aktor utama: produsen data, wali data, dan pengguna data.

Namun, koordinasi antar instansi sering kali menjadi kendala karena perbedaan standar data, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi perubahan budaya birokrasi. Situasi ini membuat negosiasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara kebijakan publik, kekuasaan, dan negosiasi dalam konteks implementasi. Negosiasi kekuasaan dianggap sebagai variabel antara yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks dinamika kekuasaan dan negosiasi antar aktor birokrasi. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada makna yang dikonstruksi oleh manusia terhadap suatu fenomena dalam konteks alamiahnya.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci proses implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di pemerintah daerah, serta bentuk-bentuk negosiasi kekuasaan yang muncul di dalamnya. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, melainkan menggali realitas sosial secara mendalam dan memberikan interpretasi ilmiah terhadapnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara konseptual pada konteks pemerintah daerah di Indonesia tanpa menyebutkan wilayah tertentu. Hal ini dilakukan agar hasil analisis dapat merepresentasikan gambaran umum implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di berbagai daerah. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, yaitu dari September hingga Desember 2025, yang mencakup tahap pengumpulan literatur, analisis kebijakan, dan penyusunan laporan akhir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah aktor-aktor birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, antara lain pejabat pemerintah daerah, dinas komunikasi dan informatika, badan perencanaan daerah, serta instansi pengguna data.

Objek penelitian adalah bentuk dan pola negosiasi kekuasaan yang terjadi di antara aktor-aktor tersebut dalam proses pelaksanaan kebijakan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kewenangan, peran, dan kepentingan masing-masing aktor berinteraksi dan memengaruhi efektivitas kebijakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Studi Kepustakaan – dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Dokumentasi – mencakup dokumen resmi pemerintah seperti Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta panduan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.
3. Analisis Isi (Content Analysis) – untuk memahami pesan, simbol, dan struktur makna yang terdapat dalam dokumen kebijakan dan literatur terkait negosiasi kekuasaan birokrasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data, berupa uraian naratif dan tabel konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses interpretasi terhadap data untuk menemukan makna dan pola negosiasi kekuasaan yang terjadi.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur, sedangkan triangulasi teori digunakan untuk menguji konsistensi hasil analisis melalui perspektif teori kebijakan publik, teori kekuasaan, dan teori implementasi kebijakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian ini bersifat konseptual, kondisi umum pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan variasi besar dalam kemampuan mengelola data. Beberapa daerah telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan antarinstansi. Tantangan yang umum ditemui antara lain perbedaan standar data, infrastruktur digital yang terbatas, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem kerja.

Kondisi tersebut menjadikan implementasi Satu Data Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga sosial dan politis. Birokrasi di daerah harus menyesuaikan struktur kekuasaan yang telah lama terbentuk agar selaras dengan prinsip keterbukaan data.

B. Proses Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia

Implementasi Satu Data Indonesia terdiri atas tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan instansi penghasil dan pengguna data. Namun, banyak daerah belum memiliki regulasi turunan yang jelas untuk mengatur kewajiban berbagi data antar instansi.

Tahap pelaksanaan sering menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Dinas tertentu kerap menolak membagikan data dengan alasan kerahasiaan atau perlindungan institusi. Pada tahap evaluasi, masih belum terdapat mekanisme penilaian yang baku terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Semua hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dan kolaborasi lintas sektor.

C. Bentuk Negosiasi Kekuasaan antar Instansi

Negosiasi kekuasaan dalam implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk:

1. Negosiasi Struktural, yaitu proses penyesuaian kewenangan antar lembaga berdasarkan hierarki organisasi. Misalnya, dinas yang lebih tinggi secara struktural dapat memengaruhi arah kebijakan data daerah.
2. Negosiasi Fungsional, yaitu koordinasi antar instansi dengan peran yang berbeda, seperti antara produsen data (BPS, Dinas Teknis) dan pengguna data (Bappeda, Dinas Keuangan).
3. Negosiasi Informal, yaitu interaksi sosial yang terjadi di luar jalur resmi birokrasi, seperti pertemuan informal antar pejabat untuk mencari kesepakatan praktis.

Negosiasi kekuasaan ini dapat menjadi positif bila diarahkan untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memperlambat pelaksanaan kebijakan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

1. Dukungan politik kepala daerah dalam memperkuat koordinasi antar instansi.

9

2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami manajemen data.

3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan integrasi data.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi:

1. Ego sektoral antar instansi yang masih tinggi.
2. Kurangnya pedoman operasional yang seragam.
3. Minimnya kesadaran mengenai pentingnya berbagi data untuk kepentingan publik

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan adaptif untuk menjembatani kepentingan antar lembaga.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di pemerintah daerah menggambarkan adanya dinamika negosiasi kekuasaan yang kompleks. Proses implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh interaksi sosial dan politik antar aktor birokrasi. Negosiasi kekuasaan terjadi dalam berbagai bentuk — struktural, fungsional, maupun informal — yang masing-masing berperan dalam menentukan arah kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi, komunikasi terbuka, serta kepemimpinan yang inklusif. Dengan demikian, kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi agenda digitalisasi, tetapi juga sarana memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan transparan.

A. Saran

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi turunan mengenai tata kelola data agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen data dan teknologi informasi.
3. Pimpinan instansi di daerah diharapkan dapat mengembangkan budaya kerja kolaboratif untuk mengurangi ego sektoral dan mempercepat pelaksanaan kebijakan satu data.

DAFTAR PISTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Portal Satu Data Indonesia*. <https://data.go.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506326139>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education. <https://www.pearson.com/store/p/understanding-public-policy>
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. <https://archive.org/details/implementingpublicpolicy>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books. https://monoskop.org/images/f/f2/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan kebijakan satu data Indonesia*. <https://kominfo.go.id/content/detail/42860>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Laporan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia 2020–2021*. <https://satudata.bappenas.go.id>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://psycnet.apa.org/record/1995-97416-000>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112765/perpres-no-39-tahun-2019>

Setiawan, A. (2022). *Analisis implementasi kebijakan satu data Indonesia di pemerintah daerah: Studi kasus pada Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(3), 211–225. <https://journal.unpad.ac.id/japi/article/view/29933>

Sulastri, R., & Hidayat, M. (2021). *Kolaborasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan publik di era digital*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 122–134. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpppa/article/view/47029>

Susanto, A., & Nurdin, M. (2020). *Dinamika koordinasi antar instansi dalam kebijakan digital pemerintah daerah*. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 44–58. <https://jurnal.apdn.ac.id/index.php/jba/article/view/625>

Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Free Press. <https://archive.org/details/theoryofsocialandeconomicorganization>

Yuliani, D., & Prasetyo, H. (2023). *Transformasi digital birokrasi dan tantangan satu data di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 15–28. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jiap/article/view/38342>

Zainal, A. (2022). *Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan data publik berbasis teknologi informasi*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2), 301–317. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/47381>